



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 20 Januari 2020

Halaman: 2

Upah Sektor Pariwisata Dikaji

UMBULHARJO (MERAPI) - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM Nakertrans) Kota Yogyakarta bakal mengkaji penerapan upah sektoral pada tahun 2020. Kajian difokuskan pada upah sektoral pariwisata karena menjadi sektor utama di Kota Yogyakarta.

"Kami akan lakukan kajian upah sektoral dulu tahun ini. Pada sektor pariwisata," kata Kepala Dinas KUKM Nakertrans Kota Yogyakarta, Lucy Irawati, Jumat (17/1).

Lucy menyampaikan, kajian upah sektoral pada pariwisata itu adalah kesepakatan bersama Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Kajian upah sektoral pariwisata akan melibatkan pihak ketiga. Penerapan upah sektoral pada pariwisata itu juga menindaklanjuti usulan dari serikat pekerja yang melakukan audiensi ke DPRD Kota Yogyakarta.

Menurutnya, dalam kajian upah sektoral, Dinas KUKM Nakertrans Kota Yogyakarta juga akan melibatkan serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sektor pariwisata. Pelibatan mereka untuk melakukan studi banding ke daerah yang telah menerapkan upah sektoral.

"Di DIY belum ada yang menerapkan upah sek-

toral, tapi Sleman pernah lakukan kajian. Daerah yang sudah menerapkan upah sektoral terutama di pariwisata adalah Kabupaten Badung di Bali. Kami akan mencari referensi dan gambaran bagaimana dan seperti apa penerapan upah sektoral pariwisata," terangnya.

Menurutnya aturan upah sektoral tidak diatur detail dalam undang-undang. Dia menyebut dalam penerapan upah sektoral tergantung dari kesepakatan serikat pekerja dan pengusaha di sektor itu. Sedangkan Dinas KUKM Nakertrans menjadi pihak yang menjembatani. Diakuinya dengan upah sektoral dimungkinkan nilainya lebih besar dibandingkan upah minimum kota (UMK). Tapi tetap tergantung kesepakatan pekerja dan pengusaha. "Jika nanti diterapkan upah sektoral Pemkot Yogya hanya mengusulkan. Sedangkan yang menetapkan DIY," imbuh Lucy.

Secara terpisah Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi Setiawan mengatakan, sektor yang memungkinkan adalah pariwisata karena yang paling besar di Yogyakarta. Misalnya hotel maupun restoran. Dia menilai penerapan upah minimum sektoral dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005